

## EFEKTIVITAS PENYALURAN BLT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN

### *EFFECTIVENESS OF DIRECT CASH ASSISTANCE DISTRIBUTION TO REDUCE POVERTY*

**Billy Kumala\* , Immanuel Ambarita, Ingrid Bonia Simamora, Rifky Putra Solihin,  
Arya Surendy Devankha, Aryo Eko Saputro**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung

\*Email korespondensi: billykumala16@gmail.com

#### ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan membutuhkan solusi yang tepat. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran BLT dalam upaya mengurangi kemiskinan di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam pada 15 Maret 2024 dengan ketua RT 02 Lingkungan 01 bernama Basri di Kecamatan Rajabasa, Kelurahan Rajabasa Raya, Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Rajabasa Raya belum efektif. Banyak masyarakat miskin yang semestinya menjadi sasaran program, malah tidak mendapatkan BLT dikarenakan dalam penyaluran BLT pemerintah menggunakan data lama yang sudah tidak relevan. Jumlah masyarakat yang menerima BLT tersebut juga hanya tiga orang warga. Kondisi ekonomi keluarga yang berubah seperti, dari kondisi miskin menjadi kaya, dari kondisi kaya menjadi miskin ataupun kondisi ekonomi keluarga yang sedang menjadi miskin, hal tersebut tidak diperhitungkan pemerintah. Jika, menggunakan data dari mereka yang sudah tidak sesuai, hal tersebut membuat program BLT tidak efektif dalam menjangkau masyarakat miskin dan upaya mengurangi kemiskinan melalui program ini tidak akan berhasil.

**Kata kunci:** Kebijakan sosial; bantuan langsung tunai; kemiskinan; implementasi kebijakan

#### ABSTRACT

*Poverty is a complex social problem and requires an appropriate solution. One of the government's efforts to overcome poverty is by providing Direct Cash Assistance (BLT). This research aims to analyze the effectiveness of BLT distribution in an effort to reduce poverty in Bandar Lampung. This study uses a qualitative method. Data was obtained through an in-depth interview on March 15 2024 with the head of RT 02 Ward 01 named Basri in Rajabasa District, Rajabasa Raya Village, Bandar Lampung City. The research results show that the distribution of direct cash assistance in Rajabasa Raya Subdistrict has not been effective. Many poor people who should have been targeted by the program, instead did not receive BLT because in distributing BLT the government used old data that was no longer relevant. The number of people who received BLT was only three people. The government does not take into account the changing economic conditions of families, such as from poor to rich, from rich to poor or the economic conditions of families who are becoming poor. If data from those people is used that is no longer appropriate, this will make the BLT program ineffective in reaching the poor and efforts to reduce poverty through this program will not be successful.*

**Keywords:** Social policy; direct cash transfer; poverty; policy implementation

#### PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah sebuah permasalahan sosial yang banyak terjadi di setiap negara, khususnya negara-negara dunia ketiga. Soerjono Soekanto (2017:321) mendefinisikan kemiskinan sebagai, ketidakmampuan seseorang memelihara diri mereka sendiri sesuai taraf kehidupan kelompok, serta orang tersebut tidak mampu memanfaatkan tenaga mental ataupun fisiknya di dalam kelompok tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat di suatu negara tergolong tinggi. Macionis (2007:4) berpendapat, Masalah-masalah pengangguran, kesehatan dan pendidikan yang disebabkan oleh kemiskinan diposisikan men-

jadi tiga dari sepuluh masalah sosial yang serius pada tahun 2006.

Apabila permasalahan kemiskinan tersebut tidak ditanggulangi dengan cepat, Hal tersebut akan membawa pada kondisi lingkungan yang suaram dan potensi sebuah kerusakan di dalam masyarakat sangat mungkin terjadi. Dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan pemerintah suatu negara akan menjalankan suatu kebijakan sosial. Hill (1997:1) mendefinisikan kebijakan sosial sebagai kebijakan yang di dalamnya terdiri dari tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Kebijakan sosial tersebut berguna dalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan

sosial serta menyejahterakan masyarakat. Kebijakan sosial itu diatur oleh setiap daerah yang diberi otonomi oleh pemerintah pusat, sehingga kepala daerah diharapkan memiliki kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya kebijakan sosial di kelompokkan menjadi 3 yaitu, peraturan dan perundang-undangan, program pelayanan masyarakat, dan sistem perpajakan.

Kebijakan sosial yang akan di analisa pada artikel ini yakni bidang program pelayanan masyarakat yang berupa bantuan langsung tunai (BLT) dalam konteks efektivitas penyaluran kepada Sasaran. Pelayanan masyarakat merupakan salah satu bidang dari kebijakan sosial. Spicker (1995:3) mengatakan kebijakan sosial dan bidang pelayanan masyarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, perumahan, dan pekerjaan sosial, yang disebutnya sebagai *The Big Five*. Pada analisa ini, berfokus pada provinsi lampung tepatnya di Jalan Marga Anak Tuha, RT 02 Lingkungan 01, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, kota Bandar Lampung. Pada Oktober 2005 untuk pertama kali Program Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan. Politikus serta pengamat banyak yang miliki pendapat bahwa program seperti itu tidak akan dapat berjalan dengan baik karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran ke yang seharusnya menerima manfaat program itu. Terlebih lagi program tersebut, dinilai tidak mendidik masyarakat untuk mandiri dan justru akan membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Yang artinya program BLT bukan sebuah solusi dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pada tahun 2024 alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp496,8 Triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jumlah anggaran itu naik sebesar 12.5% atau Rp20,5 Triliun dari tahun sebelumnya. Bantuan sosial yang diberikan pada tahun 2024 salah satunya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Anggaran bansos program BLT yang diambil dari APBN, bernilai sebesar Rp11,25 Triliun. Dari Januari hingga Maret BLT diberikan kepada keluarga penerima manfaat, dengan besaran Rp200 Ribu per bulannya. Presiden Republik Indonesia Jokowi menggaskan dalam peningkatan daya beli masyarakat, langkah pemberian BLT ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan, terlebih karena kenaikan harga bahan pokok akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan. Ada sebanyak 18,8 Juta Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bansos program BLT tersebut. Pada bulan November hingga Desember 2023 BLT yang diberikan berupa BLT El Nino dan pada tahun 2024 program BLT yang

sedang digerakkan pemerintah adalah BLT mitigasi risiko pangan.

Data dari Badan Pusat Statistik provinsi Lampung pada rentang waktu dari Maret 2015 sampai dengan Maret 2023, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan, kecuali pada Maret 2015 yang disebabkan dari kenaikan harga bahan bakar minyak mengakibatkan harga barang pokok menjadi naik dan pada Maret 2021 dampak dari pandemi Covid-19. Pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Lampung mencapai 970,67 ribu. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun 31,74 ribu orang. Penduduk miskin menurun sebanyak 24,9 ribu, jika dibandingkan dengan September 2022. Penduduk miskin di Lampung pada Maret 2023 memiliki persentase sebesar 11,11 persen, menurun sebanyak 0,33 persen dibanding sebelumnya pada September 2022 dan menurun 0,46 persen dibanding sebelumnya pada Maret 2022. Angka kemiskinan di Provinsi Lampung tersebut secara umum terus menurun. Program Bantuan Langsung Tunai yang telah dijalankan oleh pemerintah dapat menurunkan persentase dan jumlah kemiskinan di Provinsi Lampung.

Pada artikel berjudul Bantuan Langsung Tunai (Akib & Risfaisal, 2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat banyak masalah dalam implementasi bantuan langsung tunai, seperti pada pendataan. Ada beberapa data masyarakat yang tidak masuk, padahal masyarakat tersebut masuk ke golongan orang yang harusnya menerima manfaat. Pemerintah juga tidak melakukan sosialisasi terkait program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Akibatnya, banyak masyarakat lapisan bawah yang seharusnya menerima program tersebut, namun tidak mendapatkannya dikarenakan minimnya informasi mengenai tata cara mendapatkan BLT tersebut. Pada bagian-bagian di sistem sosial terdapat sebuah realitas yang selalu dapat dilihat bahwa bagian itu memiliki kepekaan yang tidak sama dalam mencapai kesejahteraan. Meskipun bagian itu memiliki kepekaan yang sama, tetapi kesejahteraan yang diperoleh bisa berbeda. Hal itu dikarenakan pemerintah memberi rangsangan yang diskriminatif. Pemerintah cenderung memberikan rangsangan kepada bagian-bagian atau kelompok yang memiliki kepekaan lebih, dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi secara cepat. Akibatnya ketimpangan di lapisan masyarakat semakin tinggi.

Pelaksanaan program yang mempunyai sasaran kepada lapisan masyarakat miskin, tidak jarang terjadinya ketidaktepatan sasaran. Lapisan masyarakat miskin yang seharusnya menjadi sasaran, malah dimanfaatkan lapisan masyarakat lain dengan alih-alih supaya menjamin program itu

berhasil serta memiliki impresi yang baik. Adanya pandangan apabila program tersebut secara konsisten diberikan pada lapisan masyarakat miskin, maka kemungkinan keberhasilan program itu menjadi lebih kecil. Padahal, program itu sendiri dinilai berhasil atau tidak, apabila dapat membebaskan lapisan masyarakat bawah dari kemiskinan. Hasil lain pada penelitian itu yakni pemberian program BLT kepada masyarakat miskin menghasilkan dampak positif bagi pemenuhan kebutuhan hidup jangka pendek dan dampak negatif yakni banyak masyarakat miskin yang menjadi ketergantungan terhadap program itu dan terdapat banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan BLT yang seharusnya menjadi sasaran dari program tersebut.

Dengan demikian penelitian ini memfokuskan pada apakah program BLT tersebut sudah efektif dalam menjangkau penerima manfaat, serta dapat benar-benar mengurangi kemiskinan pada lapisan masyarakat bawah. Campur tangan dan peran pemerintah yang tepat menjadi suatu kunci dalam keberhasilan program tersebut. Program BLT yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yang sangat miskin, pasti akan sangat membantu mereka masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti untuk makanan pokok, sandang pokok, biaya sewa tempat tinggal dan lain sebagainya. Sangat penting bagi pemerintah untuk mendata secara tepat dan benar mana lapisan masyarakat miskin yang memang benar-benar layak mendapatkan program tersebut. Alih-alih memberikan BLT kepada lapisan masyarakat miskin, pemerintah memberikan kepada masyarakat lapisan tertentu dengan maksud agar program tersebut dipandang berhasil dan memiliki kesan yang baik. Mengeluarkan masyarakat miskin dari keadaan hidup mereka yang sulit adalah esensi dari program itu sendiri, sudah sepatutnya pemerintah tidak melupakan tujuan utama dari program tersebut.

Maka dari itu, efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai ini sangat menarik untuk dianalisis dalam upaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Provinsi Lampung khususnya di Kecamatan Rajabasa. Artikel ini menganalisis Bagaimana mekanisme dan pengawasan penyaluran BLT serta sejauh mana program tersebut efektif dalam menjangkau masyarakat penerima manfaat, bagaimana pengaruh kebijakan program BLT dalam mengurangi kemiskinan dan bagaimana evaluasi kebijakan penyaluran BLT di Jalan Marga Anak Tuha, RT 02 Lingkungan 01, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, kota Bandar Lampung.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil dan menganalisa data primer dan data sekunder. Metode penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami subjek agar tidak

terjadi generalisasi dan lebih memfokuskan dengan penyelidikan yang mempunyai hubungan antar fenomena yang diamati yakni Analisis efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai dalam upaya mengurangi Kemiskinan agar bisa menjawab pertanyaan dan permasalahan yang ada. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam pada 15 Maret 2024 dengan ketua RT 02 Lingkungan 01 bernama Basri di Kecamatan Rajabasa, Kelurahan Rajabasa Raya, Kota Bandar Lampung. Kami menggunakan teknik semi-struktur dan berlangsung selama 1 jam. Kami menggunakan teknik pengumpulan data ini untuk mendapatkan informasi terkait efektivitas penyaluran BLT, mekanisme, pandangan terhadap BLT sebagai upaya penguangan kemiskinan, dan evaluasi terhadap program di di Jalan Marga Anak Tuha, RT 02 Lingkungan 01 Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Adapun karakteristiknya sebagai berikut: Penerima Manfaat Pihak yang menerima bantuan dari program pemerintah baik berupa anak-anak, dewasa dan paruh baya, Kami juga menggunakan Data Triangulasi untuk menyelaraskan data yang diterima antara informan dengan memanfaatkan data sekunder yang diambil dari buku, koran, berita online dan jurnal. Analisis Data dilakukan bertahap yakni: 1. Menggarap dan menyiapkan data untuk dianalisis, 2. Membaca keseluruhan data yang ada, 3. Menelaah data, 4. Mengimplementasikan mekanisme hal akan dijabarkan, 5. Menampilkan gambaran serta tema di dalam narasi, 6. Memaknai data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dalam Mengurangi Kemiskinan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung ke informan yang kami temui yakni Pak Mimbasri selaku RT 2 di lingkungan 1, di Jalan Marga Anak Tuha, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, yang dilakukan pada 15 Maret 2024, dapat diketahui bahwa bantuan di daerah tersebut jarang berupa uang tunai tapi dalam bentuk lain seperti bahan-bahan pokok yaitu beras. Untuk di daerah Jalan Marga Anak Tuha sendiri Bantuan yang sering diberikan ke warga itu dalam bentuk beras 5 kg dan BLT yang berupa uang sebetulnya ada tetapi itu jarang diberikan. Besaran dari BLT pada tahun 2024 yang diberikan sekitar Rp.200.000 per bulan selama Januari hingga Maret dan besar kemungkinan akan berlanjut sampai Juni 2024.

Pak Basri menerangkan bahwa di daerah nya hanya ada tiga orang warga yang mendapatkan BLT, besaran dari BLT yang diterima warga kisaran Rp. 200.000. Pak Basri juga berpendapat bahwa BLT ini kurang maksimal dalam pembagiannya. Karena kurang maksimal dalam

pembagian alhasil bantuan tersebut tidak merata, yang harusnya BLT ini diberikan ke semua warga yang dalam keadaan miskin, tetapi hanya beberapa warga saja yang mendapatkan bantuan tersebut. Padahal dana yang dikeluarkan untuk membantu warga mengatasi masalah tersebut terbilang cukup banyak. Selain itu, pak Basri juga memberi tahu kami, bahwa BLT ini tidak tepat sasaran karena pemerintah menggunakan data yang sudah lama. Data lama yang masih digunakan oleh pemerintah ini pasti sudah tidak relevan, sehingga hal ini akan menyebabkan pembagian BLTnya tidak tepat sasaran.

Seharusnya pemerintah melakukan pendataan yang akurat dan lebih serius dalam menangani hal ini dengan langsung menanyakan kepada warga yang kurang mampu agar bisa mengetahui lebih jelas lagi siapa saja yang seharusnya menerima bantuan tersebut, karena dengan tahu targetnya siapa saja maka program BLT ini bisa selalu tepat sasaran. Kekonsistensian pemerintah juga perlu dipertanyakan, karena terkadang BLT ini justru diberikan kepada keluarga tertentu yang bisa dibilang tidak memenuhi kriteria atau juga malah keluarga yang secara ekonomi mampu, padahal harusnya BLT ini diberikan secara merata kepada keluarga yang benar-benar kurang mampu. Hal ini dilakukan pemerintah bisa jadi agar program bantuan tersebut berhasil ataupun juga agar dipandang baik oleh publik. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pendistribusian BLT ini dan memperbarui data secara rutin serta memastikan proses seleksi penerima bantuan dilakukan dengan jujur dan serius.

Tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bandarlampung adalah untuk meminimalkan kemiskinan dengan mendukung keuangan langsung kepada komunitas yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan fundamental orang miskin dan rentan, program ini mencakup sejumlah bidang berbeda seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Salah satu contoh pemanfaatan BLT adalah BLT UMKM, dimana pemerintah memberikan bantuan dana sebesar Rp2,4 juta dikirim langsung ke rekening penerima, untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) tetap beroperasi. Namun pelaksanaan program ini terkendala beberapa permasalahan, seperti pendataan keluarga penerima manfaat yang tidak selalu sesuai dengan tujuan. Hal ini disebabkan oleh pengumpulan data yang tidak akurat dan kurangnya pedoman umum atau pelaksanaan program. Namun sistem penyaluran dana dinilai cukup baik karena dapat memastikan dana sampai ke penerima dengan aman dan cepat. Pada artikel berjudul Implementasi (Putong & Wahyudi)

Program Bantuan Sosial Tunai Pada UMKM hasil penelitian menunjukkan implementasi program Bantuan Sosial Tunai pada UMKM di Kota Balikpapan cukup berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan sasaran program memiliki arah yang jelas, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana sudah terpenuhi dengan baik, komunikasi dan karakteristik sudah terimplementasi dengan baik, Keterlibatan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari segi ekonomi dan politik sudah mendukung namun dari segi sosial masyarakat masih khawatir terkait ketidakmerataan bantuan, disposisi sudah baik, dan hal yang masih kurang mengenai penjelasan terhadap masyarakat yang tidak menerima bantuan. Meskipun terdapat beberapa kendala, kebijakan BLT Bandar Lampung telah membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada mereka yang berada dalam keadaan sulit. Peningkatan akurasi informasi penerima manfaat dan penyaluran dana merupakan faktor penting dalam keberhasilan program ini. Implementasi program atau kebijakan, pengelolannya dan memiliki efek terhadap masyarakat merupakan semua aspek implementasi kebijakan (Suwitri, 2008: 80). Apakah program BLT mengikuti standar operasional prosedur (SOP) Sebab, SOP sebenarnya adalah petunjuk operasional atau petunjuk teknis bagi satuan organisasi yang melakukan kegiatan penegakan kebijakan. Karena standar-standar tersebut telah menjadi peraturan resmi yang berlaku dan dipandang sebagai pilihan terbaik sebagai produk hukum, maka standar-standar tersebut harus dipatuhi.

### **Efektivitas BLT dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima**

Efektivitas merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan program. Pencapaian tolak ukur menggunakan metrik untuk menunjukkan seberapa efektif kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Jalan Marga Anak Tuha, RT 02 Lingkungan 01, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, dan berfokus pada seberapa efektif Bantuan Langsung Tunai (BLT) memperbaiki kehidupan orang miskin. Efisiensi erat kaitannya dengan efisiensi dan produktivitas. Produktivitas adalah ukuran jumlah yang diperoleh dibandingkan dengan jumlah yang diberikan. Proses penyelesaian konstruksi khususnya penyaluran BLT di Jalan Marga Anak Tuha, RT 02 Lingkungan 01, harus selesai sesuai rencana. Pemerintah selalu memperhatikan masalah kesejahteraan. Salah satu contohnya adalah permasalahan kemiskinan yang terus terjadi sehingga mengharuskan kebijakan atau program dibuat oleh pemerintah yang tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kemiskinan tetap dalam perhatian pemerintah. Definisi hukum kemiskinan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana status sosial ekonomi salah satu individu atau kelompok individu tidak memenuhi hak asasi manusia untuk hidup bermartabat (RUU RI). Dalam pembangunan sumber daya manusia, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk berinvestasi pada aspek tersebut dalam upaya pengentasan kemiskinan. Komitmen tersebut terdapat dalam konstitusi sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap proses pembangunan. Kewajiban itu juga tertuang dalam Pancasila sila kedua dan kelima serta pada UUD 1945 adalah landasan ideal untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, banyak upaya telah dilakukan di Indonesia untuk mengatasi kemiskinan dan menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai hal yang paling penting.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah nyata untuk mengurangi kemiskinan di tanah air demi kepentingan rakyat dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) diciptakan untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini memberikan bantuan keuangan langsung kepada rumah tangga yang tergolong sangat miskin, miskin atau hampir miskin. Selain itu, masyarakat juga menghadapi permasalahan seperti kehilangan pekerjaan dan masalah kesejahteraan lainnya selama pandemi COVID-19. Perppu 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Pendanaan Pengendalian dan Penyebaran Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pemerintah merumuskan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai untuk membantu masyarakat dalam keadaan kemiskinan, yang mempunyai dasar hukum. Bantuan keuangan langsung ini akan diberikan selama tiga bulan kepada setiap keluarga miskin sejumlah Rp 600.000, pada bulan berikutnya diberikan Rp 300.000. Bantuan keuangan langsung ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengurangi biaya hidup selama pandemi. Pertanyaannya sekarang apakah uang langsung ini bisa membantu banyak orang. Penerapannya pasti ada pro dan kontra.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program BLT**

Menurut Edward III (1980:10), ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

#### 1. Komunikasi (*communication*);

Banyak informasi dikirim satu sama lain melalui proses komunikasi, memastikan bahwa informasi yang dikirimkan akurat, jelas, dan konsisten. Dengan kata lain, jika komunikasi antara pemerintah dan RT/RW akurat dan jelas, maka Program BT akan berjalan dengan baik dan bantuan pasti ada. Jika tidak, bantuan

tersebut mungkin tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

#### 2. Sumber daya (*resources*);

Sumber daya yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan harus cukup besar, mempunyai pengetahuan dan keterampilan serta keahlian yang relevan. Mereka juga harus menghindari kecurangan. Jika sumber daya manusia (pemerintah) pelaksana kebijakan atau program BLT tidak jujur, maka tidak akan berhasil. Sebaliknya, program BLT berhasil jika memiliki informasi yang cukup atau relevan, cerdas, dan tidak curang.

#### 3. *Attitude* (sikap);

Pelaksana kebijakan harus secara serius mendukung implementasi kebijakan, memiliki inisiatif, visi kebijakan dan intensitasnya, serta berperan untuk mendorong tercapainya program. Sikap ini berpengaruh kepada keberlangsungan program BLT ini, karena jika pemerintah serius maka program ini akan berhasil dan sebaliknya.

#### 4. Struktur birokrasi (*bureaucratic Structure*);

Implementasi suatu kebijakan melibatkan langkah-langkah birokrasi antara berbagai lembaga dan lembaga yang harus bekerja dengan baik untuk menjamin keberhasilan implementasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, program Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat akan dilaksanakan pada periode waktu yang ditetapkan. Mulai bulan Januari hingga Maret BLT diberikan kepada keluarga penerima manfaat, dengan besaran Rp200 Ribu per bulannya. Presiden Republik Indonesia Jokowi menggaskan dalam peningkatan daya beli masyarakat, langkah pemberian BLT ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan, terlebih karena kenaikan harga bahan pokok akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan. Pada artikel berjudul Mengukur Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (Wafiq & Putra, 2023) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BLT di Indonesia belum memberikan dampak terhadap konsumsi makanan dan nonmakanan secara umum, Artinya pemberian bantuan tersebut belum mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima program sebagaimana tujuan dari program yakni meningkatkan atau mempertahankan daya beli masyarakat. Namun, pemberian BLT mampu meningkatkan konsumsi beras. Ada sebanyak 18,8 Juta Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bansos program BLT tersebut. Tahun sebelumnya pada bulan November hingga Desember 2023 BLT yang diberikan berupa BLT El Nino dan pada tahun 2024 program BLT yang sedang digerakkan pemerintah adalah BLT mitigasi risiko pangan.

## Pengaruh dan Evaluasi Kebijakan Program BLT dalam Mengurangi Kemiskinan

Pemerintah menetapkan program Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2005 untuk memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat miskin, dengan pembayaran bulanan Rp60.000 untuk setiap kelompok dan Rp30.000 untuk masing-masing kelompok. Bantuan Langsung Tunai, sebuah program kesejahteraan sosial, bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Ini berkontribusi pada peningkatan konsumsi rumah tangga di Indonesia. Program BLT meningkatkan kemampuan warga untuk mengendalikan sumber daya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara juga meningkatkan dukungan mereka untuk program pemerintah. Ini mendorong kerjasama, memungkinkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program BLT memiliki kelebihan dan kekurangan ketika diterapkan, dan keuntungan bagi masyarakat penerima manfaat dari program Bantuan Langsung Tunai. Program BLT di Indonesia menghadapi tantangan karena kurangnya basis data yang luas, kurangnya kualitas data, dan kesulitan memperbarui, yang dapat menghalangi efektivitas program dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menerapkannya secara efektif. Kurangnya penilaian terhadap partisipasi masyarakat menyebabkan program BLT yang tidak efisien, dan bantuan kepada masyarakat akan membuat masyarakat tidak mandiri dan membuat mereka bergantung pada pemerintah, dan kecemburuan sosial terjadi di masyarakat.

### KESIMPULAN

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Jalan Marga Anak Tuha, Kelurahan Rajabasa Raya belum efektif. Banyak masyarakat miskin yang semestinya menjadi sasaran program, malah tidak mendapatkan BLT dikarenakan dalam penyaluran BLT pemerintah menggunakan data lama yang sudah tidak relevan. Jumlah orang yang menerima BLT tersebut juga hanya tiga orang warga. Kondisi ekonomi keluarga yang berubah seperti, dari kondisi miskin menjadi kaya, dari kondisi kaya menjadi miskin ataupun kondisi ekonomi keluarga yang sedang menjadi miskin, hal tersebut tidak diperhitungkan pemerintah. Jika, menggunakan data dari mereka yang sudah tidak sesuai, hal tersebut membuat program BLT tidak efektif dalam menjangkau masyarakat miskin dan upaya mengurangi kemiskinan melalui program ini tidak akan berhasil.

Program BLT yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yang sangat miskin dan lansia, pasti akan sangat membantu mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sangat

penting bagi pemerintah untuk mendata secara tepat dan benar mana lapisan masyarakat miskin yang memang benar-benar layak mendapatkan program tersebut. Alih-alih memberikan BLT kepada lapisan masyarakat miskin, pemerintah memberikan kepada masyarakat lapisan tertentu dengan maksud agar program tersebut dipandang berhasil dan memiliki kesan yang baik ataupun sebagai formalitas agar pemerintah tidak dipandang menelantarkan rakyat. Mengeluarkan masyarakat miskin dari keadaan hidup mereka yang sulit adalah esensi dari program itu sendiri, sudah sepatutnya pemerintah tidak melupakan tujuan utama dari program tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ageng, M. (2021, December 11). Analisa Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT). *Kompasiana*.
- Akib, I., & Risfaisal, R. (2017). Bantuan Langsung Tunai. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2). <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i2.283>
- Ardito Ramadhan, & Icha Rastika. (2024, February 27). Pemerintah Kucurkan BLT Lagi, Cair Awal Maret 2024. *Kompas.Com*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Lampung Maret 2023. In *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*.
- Burhanuddin. (2021). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tuna Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. In *Tesis*.
- Desti, E. D. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pontianak Barat. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 10(2). <https://doi.org/10.26418/publika.v10i2.2835>
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015. *MENARA: Ilmu*, 15(2).
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy (Menerapkan Kebijakan Publik)*. Congressional Quarterly Press.
- Hill, M. (1997). *Understanding Social Policy*. Blackwell Publishers.
- Kartika Sari, A. D. (2020, April 20). Pemerintah Susun Mekanisme Pengawasan Penyaluran BLT. *Bisnis.Com*.
- Macionis, J. J. (2007). *Social Problems*. Pearson Prentice Hall.
- Mangeswuri, D. (2024). Efektivitas Program Bantuan Sosial Dalam Pengendalian Inflasi. In *Info Singkat: Vol. XVI (Issue 3)*. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI.

- Putong, L. B., & Wahyudi, K. E. (2022). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 338. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i4.8158>
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, VII(108).
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Revisi). Rajawali Pers.
- Spickers, P. (1995). *Social Policy, Themes and Approaches*. Prentice Hall.
- Wafik, A. Z., & Putra, I. K. (2023). Mengukur Dampak Program Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 251. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8234>